



Sikapi Dinamika Pilpres 2024 Wapres Pilih Netral, Tak Memihak

JAKARTA (KR) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan akan tetap netral dalam menyikapi dinamika Pemilu 2024. Selain itu juga tidak akan memihak salah satu pasangan calon.

"Saya sejak awal sudah memosisikan diri untuk bersikap netral. Tidak memihak (salah satu pasangan calon)," tandas Wapres ketika ditemui di Jakarta, Kamis (25/1).



KR-Antara/M Risyah Hidayat

Menurut Wapres, suara yang akan diberikan bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pilihannya adalah hal yang sangat rahasia dan pribadi.

"Perkara nanti (siapa) pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saja pada tanggal 14 Februari (pada hari pemungutan suara). Dan tidak boleh ada yang tahu," tuturnya.

Saat dimintai tanggapan soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa seorang Presiden boleh memihak dan boleh ikut berkampanye, Wapres menyebut bahwa sesuai

aturan memang boleh. "Saya kira soal (pernyataan) Presiden sudah jelas ya. Aturannya boleh. Ada pihak yang tidak setuju, ada yang setuju, silakan saja nanti urusannya publik saja yang menilai," ujarnya.

Wapres juga mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan pernyataan Jokowi, yang dinilai banyak pihak telah menyalahi etika politik. "Tetapi ini bukan berarti perbedaan dengan Presiden. Kalau Presiden sudah mengatakan seperti itu ya sudah, ya (tetapi) saya memang (memilih) tetap netral," jelasnya.

Sebelumnya, Rabu (24/1), Presiden Jokowi menyebut bahwa Presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet

* Bersambung hal 7 kol 5



KR-BPPTKG

Awan panas guguran Gunung Merapi yang terjadi Kamis (25/1/2024) pukul 16.09 WIB.

PENAMBANGAN DI DAERAH BAHAYA, DILARANG Terjadi 3 Kali Luncuran Awan Panas Merapi

YOGYA (KR) - Gunung Merapi teramati tiga kali mengeluarkan awan panas guguran (APG), Kamis (25/1), yaitu pukul 16.06, 16.09, dan 16.13 WIB. Luncuran awan panas terjauh 1.500 meter ke arah Barat Daya (Kali Bebeng) dengan amplitudo maksimal 29 mm dan durasi 150.6 detik.

Selain itu teramati lima kali guguran lava juga ke arah Barat Daya (Kali Bebeng) dengan jarak luncur maksimal 1.300 meter. Saat terjadi awan panas guguran, visual Gunung Merapi tampak dan arah

angin ke Timur. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan.

Dari pemantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), terjadi hujan di puncak dan lereng Merapi mulai pukul 15.39 WIB dengan total curah hujan 11.40 mm, durasi 25 menit, serta intensitas 27.11 mm/jam. "Waspada bahaya lahar di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi dan awan panas guguran di daerah potensi bahaya," kata Kepala BPPTKG Agus Budi

Santoso.

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental, disimpulkan aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif. Status Gunung Merapi masih dalam tingkat Siaga (Level III).

Potensi bahaya berupa guguran lava dan APG pada sektor Selatan-Barat Daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng maksimal 7 km. Pada sektor Tenggara meliputi

* Bersambung hal 7 kol 1

JIKA PRESIDEN KAMPANYE Ajukan Cuti ke Dirinya Sendiri

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menjelaskan, bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk ikut kampanye selama Pemilu 2024, maka ia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

"Presiden mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri)," kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/1).

Hasyim, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan hak politik presiden untuk terlibat kampanye dilindungi dan diatur peraturan perundang-undangan. Pasal 281 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara. Artinya, presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika ia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. "Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden dan kemudian presiden memberikan surat izin dan setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan," jelas Hasyim.

Anggota KPU Idham Holik menambahkan, UU

* Bersambung hal 7 kol 5

PENJUAL SNACK DI KEBAKKRAMAT DIAMANKAN Densus 88 Tangkap 10 Terduga Teroris

KARANGANYAR (KR) - Tim Densus 88 Antiteror menangkap Tri Arianto (37) warga Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat, Kamis (25/1). Penjual snack sekaligus pengurus Masjid Annur Kebakkramat ini diduga terlibat jaringan teroris.

Bapak tiga anak ini disergap saat berada di Jalan Raya Kebakkramat, tepatnya dekat lampu merah depan Mapolsek setempat. Tim Densus kemudian menggeledah rumah kontrakkannya di Dukuh Kebakjetis RT 03 RW 09 Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat pada Kamis siang. Selama 1,5 jam, polisi memeriksa isi rumahnya. Dari dalam rumah itu, polisi membawa keluar dua buah tenda lipat dan satu unit ponsel merek Nokia.



KR-Abdul Alim

Polisi mengamankan sejumlah benda dari rumah kontrakan Tri.

Kepala Dusun (Kadus) Kebakjetis, Suyatno diminta hadir menyaksikan pengeledahan itu di area yang telah dipasang garis polisi. Suyatno mengaku tak tahu menahu kasus kejahatan yang melibatkan warganya itu sehingga harus ditangkap aparat. Setahunya, Tri meru-

pakan warga asli Kebakkramat dan bukan pendatang. Rumah orangtuanya tak jauh dari tempatnya mengontrak. Di rumah kontrakan itu, Tri tinggal bersama istri dan tiga anaknya. "Terkait apa penangkapan dan pengeledahan, saya kurang paham. Orangnya

* Bersambung hal 7 kol 1

SERENTAK DI 71.000 LOKASI KPU Lantik 5,7 Juta Anggota KPPS

JAKARTA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik secara serentak 5.741.127 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di 71.000 lokasi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Kamis (25/1).

Jutaan anggota KPPS itu selepas dilantik oleh Ketua KPU RI langsung menerima bimbingan teknis (bimtek) secara serentak, di antaranya teknis-teknis pemungutan suara. Hasyim menjelaskan, berbeda dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang hanya memberikan bimtek kepada satu anggota KPPS per TPS, pada Pemilu 2024, seluruh anggota KPPS sebanyak tujuh orang tiap TPS mendapatkan bimtek dari KPU.

"Tentu tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas kelayakan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Selain itu, kalau tujuh orang ini dilatih, maka juga ada kesempatan bagi tujuh orang ini saling mengingatkan pemahaman dan kemampuan teknis dalam penyelenggaraan pemungutan, penghitungan suara di TPS," kata Hasyim selepas acara pelantikan.

Hasyim melanjutkan, langkah itu juga bertujuan meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, integritas dan transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024. Bimbingan teknis itu, berlangsung, kemarin dan berlanjut pada Jumat-Sabtu (26-27/1).

Dalam acara yang sama, Ketua KPU RI juga mengumumkan aksi penanaman 5.709.898 bibit pohon di 71.000 lokasi pelantikan anggota KPPS di seluruh

* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:54	15:15	18:08	19:22	04:16
Jumat, 26 Januari 2024	Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY				

Analisis Nasionalisme Politik Agung SS Widodo MA



DARI sekian pilihan atas konsepsi kenegaraan, kita pada akhirnya memilih nasionalisme sipik politik (*civic-political nationalism*). Yakni negara ditempatkan sebagai unsur pemersatu. Dari persepektif atas kebangsaan merupakan manifestasi dari komunitas politik yang memiliki kehendak bersama (*political community of will*). Serta dibangun atas keputusan rasional para warga negara yang sederajat dalam dasar kesamaan kehendak dan tumpah darah (Hutchinson, 2005).

Dengan demikian kehadiran Bangsa Indonesia tidak lain adalah kualifikasi besar untuk mengakomodasi nilai, kepentingan, serta menjaga keberagaman budaya. Akan tetapi kunci pokok atas logika nasionalisme politik ini bukanlah pada kesamaan budaya, adat dan tata nilai, melainkan karena adanya negara persatuan yang menampung cita-cita politik bersama. (Yudi Latif, Negara Paripurna, 2011).

* Bersambung hal 7 kol 1

JPU BERALASAN TAK PUNYA RASA KEMANUSIAAN Pelaku Mutilasi Mahasiswa UMY Dituntut Mati

SLEMAN (KR) - Dua pelaku mutilasi mahasiswa UMY Redho Tri Agustian, yakni terdakwa Waliyin (29) dan Ridduan (38) dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hanifah SH dan Rina Wisata SH, Kamis (25/1) di Pengadilan Negeri Sleman. Alasan tuntutan hukuman mati karena tidak mempunyai rasa kemanusiaan.

"Kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana dakwaan primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (I) ke 1 KUHP," ungkap Hanifah dan Rina saat

membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim Cahyono SH.

Diungkapkan JPU, kejadian mutilasi bermula pa-

da 9 Juli 2023 saat terdakwa Ridduan mendapat pesan dari Facebook dengan grup BDSM. Ia lantas menghubungi terdakwa

satu Waliyin yang juga berada di grup sama dan segera melakukan janji untuk melakukan aktivitas seksual menyimpang.

"Jadi aktivitas ini bentuk penyimpangan seksual berhubungan dengan kekerasan, budak dan

* Bersambung hal 7 kol 5



KR-Saifullah Nur Ichwan

Kedua terdakwa konsultasi dengan penasihat hukumnya.

SUNGGUH
SUNGGUH
TERJADI

● SAAT perkemahan akhir semester kemarin, sekolah mengadakan lomba membuat jamu kunir asem. Anak-anak antusias mengikuti lomba tersebut. Ketika Pembina mencicipi hasilnya untuk dinilai, macam-macam rasanya. Selesai menilai hasil lomba, Pembina itu malah diare. (Ayunurita Safitri, MTsN 1 Yogyakarta)-f